

**PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN SURAT KEPUTUSAN  
BERSAMA DUA MENTERI NO 8 & 9 TAHUN 2006 TENTANG  
PENDIRIAN GEREJA DI WAY KANDIS KECAMATAN  
TANJUNG SENANG**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah dan  
Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**RADEN INTAN**  
LAMPUNG

Oleh:

RESKA ISMAYNI

NPM : 1421020212

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1439 H/2018 M**

## **ABSTRAK**

### **PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DUA MENTERI NO 8 & 9 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN GEREJA DI WAY KANDIS KECAMATAN TANJUNG SENANG**

**Oleh:  
Reska Ismayni**

Indonesia merupakan negara yang plural akan agamanya. Di mana adanya kepluralan tersebut apabila tidak adanya sikap saling toleransi agama dan bersikap adil yang menyangkut keyakinan yang berhubungan dengan akidah yaitu sikap lapang dada untuk memberi kesempatan pemeluk agama selain Islam beribadah di tempat ibadahnya menurut ketentuan agama yang diyakininya dengan nyaman dan aman maka akan menimbulkan beberapa konflik keagamaan. Seperti yang terjadi di Way Kandis kecamatan Tanjung senang di mana ada masyarakat yang menolak adanya pendirian tempat ibadah umat non muslim yaitu Gereja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Hukum Islam dan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri No 8 dan 9 tahun 2006 mengenai Pendirian gereja di Way Kandis tersebut. Serta memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan secara Hukum Islam dan Pandangan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri No. 8 & 9 tahun 2006 mengenai Pendirian Gereja di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengadakan penelitian dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang di angkat untuk di teliti. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara serta informasi dari pihak Ketua Panitia Pendirian Gereja yang ada di Way Kandis Kecamatan Tanjung senang. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Hasil penelitian dari Pendirian tempat Ibadah Gereja yang terjadi di Way Kandis telah memenuhi syarat yang terdapat di dalam Surat keputusan Bersama Menteri No. 8 dan 9 tahun 2006 mengenai Pendirian tempat Ibadah. Hanya saja beberapa dari masyarakat sekitar Way Kandis yang menolak akan pendirian tempat ibadah non-muslim tersebut yang mengatasnamakan masyarakat yang kurang memahami dan memaknai arti dari toleransi agama dan bersikap adil terhadap sesama pemeluk agama. Secara hukum Islam sendiri tidak ada larangan mengenai pendirian tempat ibadah non muslim ditempat mayoritas muslim apabila sebelumnya sudah ada persetujuan, perjanjian dan kesepakatan mengenai hal tersebut. Kebebasan beragama di Indonesia juga telah diatur dalam UUD dan dalam Piagam Madinah



**KEMENTRIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


**Judul** : PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN SURAT  
KEPUTUSAN BERSAMA DUA MENTERI NOMOR 8  
& 9 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN GEREJA DI  
WAY KANDIS KECAMATAN TANJUNG SENANG

**Nama** : Reska Ismayni  
**NPM** : 1421020212  
**Jurusan** : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)  
**Fakultas** : Syariah

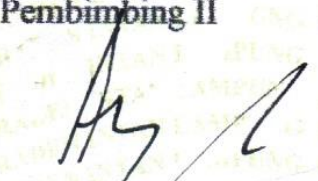
**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

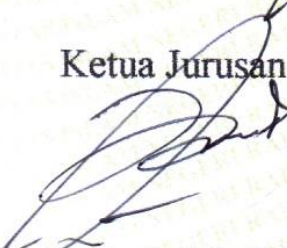
**Pembimbing I**

  
**Dr. Azzamsvah, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP: 197009011997031002**

**Pembimbing II**

  
**Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**  
**NIP: 197408162003122004**

**Ketua Jurusan**

  
**Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.**  
**NIP: 195808171993031002**





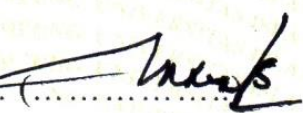
**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**


*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*


**PENGESAHAN**


Skripsi dengan judul: **PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DUA MENTERI NOMOR 8 & 9 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN GEREJA DI WAY KANDIS KECAMATAN TANJUNG SENANG**. Oleh: **RESKA ISMAYNI**, NPM: **1421020212**, Jurusan: **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)**, telah diajukan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: **Rabu, 01 Agustus 2018**

**TIM PENGUJI**

**Ketua sidang** : Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I. (.....)

**Sekretaris** : Kartika S, M.Pd (.....)

**Penguji I** : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

**Penguji II** : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. (.....)

**Dekan,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum**

( **Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ  
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (Q.S. Al-Mumtahanah: 8)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Al-Quran dan Terjemahannya, *Al-Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Penerbit Kalim, Al-Mumtahanah hlm 551

## PERSEMBAHAN

### Dipersembahkan Kepada :

1. Ayah dan Bunda tercinta Tarmuji Awaludi, S.H dan Estutinah yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa seperti ini, serta senantiasa mendoakan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Dan berkat doa restu keduanyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini.
2. Kakak Kandungku Reza Setiawan yang sudah menjadi motivasi serta contoh yang baik untuk saya sebagai adiknya karena ia telah terlebih dulu mencapai gelar sarjananya serta Adik laki-lakiku Muhammad Redi Fikriansyah yang selalu mendoakan ku dan semoga gelar ini bisa menjadi motivasi juga buat adikku supaya bisa terus melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-cita setinggi-tingginya.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.
4. Jurusan Hukum Tata Negara khususnya Siyasah (D) yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
5. Teman-teman seperjuanganku yang sama-sama ingin mencapai gelar sarjananya, yang saling memotivasi dan saling mendoakan satu sama lain terutama buat Wilda, Mae, Ori, Jubir, Widi, Ulvi, Masmita, Caca, Yuna, Rizki, Enggi, Dede, Bang Eka dan Juned.

## **RIWAYAT HIDUP**

1. Penulis dilahirkan di Bandar Jaya Lampung Tengah, 28 Mei 1996 dengan nama lengkap Reska Ismayni anak dari buah cinta kasih pasangan bapak Tarmuji Awaludi dengan ibu Estutinah, penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.
2. Penulis mengawali pendidikan pada TK Pertiwi Bandar Jaya Lampung Tengah, dan diselesaikan pada tahun 2002.
3. Pendidikan dilanjutkan di Sekolah Dasar Negeri 4 Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar, dan diselesaikan pada tahun 2008.
4. Selanjutnya menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar, dan diselesaikan pada tahun 2011.
5. Pendidikan Menengah Atas dilanjutkan di SMAN 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah, dan selesai pada tahun 2014.
6. Pada tahun 2014 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Selama menjadi Mahasiswa penulis sempat tergabung dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa dan penulis juga aktif mengikuti seminar yang berkaitan dengan Hukum, dan kepemimpinan selama duduk di bangku kuliah.

Bandar Lampung, 2018

Penulis

**Reska Ismayni**

1421020212



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penggenggam diri dan seluruh ciptaanya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah mewariskan dua sumber caya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadist.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalm Ilmu Syari'ah, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sekaligus selaku pembimbing I dalam penulisan Skripsi
3. Dr. H. Khairudin, M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
4. Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. Selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini



5. Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. Selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
6. Frengki M.Si Selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syariah
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
8. Ketua Panitia Pendirian Gereja Chrisantus Tri Suprastyo yang telah memberikan bantuan dan memberikan izin untuk melakukan penelitian
9. Rekan-Rekan Mahasiswa Fakultas Syariah Khususnya Jurusan Siyasah Syar'iyah yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal baik bapak ibu serta teman-teman akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 2018

Reska Ismayni  
1421020212

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
MOTO .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	17
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	18
F. Metode Penelitian .....	19

## **BAB II ATURAN HUKUM ISLAM DAN SKB 2 MENTERI NO. 8 & 9 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH**

A. Pengertian rumah ibadah dan macam-macamnya .....	24
B. Aturan rumah ibadah menurut Hukum Islam .....	31
C. Aturan rumah ibadah menurut SKB 2 Menteri .....	43
D. Kebebasan Beragama dan Menjalankan Agama menurut Hukum Islam, Pancasila dan UUD 45 .....	49

## **BAB III PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI WAY KANDIS KECAMATAN TANJUNG SENANG**

A. Gambaran umum di way kandis kecamatan tanjung senang .....	52
1. Sejarah Kelurahan Way Kandis .....	52
2. Keadaan geografis .....	54
3. Keadaan demografis .....	55
4. Komposisi Penduduk .....	56
B. Pendirian Rumah Ibadah Gereja di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang .....	59

## **BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN SKB 2 MENTERI NO. 8 & 9 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH**

A. Pandangan Hukum Islam tentang Pendirian Gereja di Way Kandis Kec. Tanjung Senang .....	65
B. Pandangan SKB 2 Menteri terhadap Pendirian Gereja di Way Kandis Kec. Tanjung Senang .....	67

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Blanko Konsultasi Skripsi .....

Lampiran 2 : Surat Izin Riset .....

Lampiran 3 : Piagam Madina .....

Lampiran 4 : SKB 2 Meteri .....





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Penegasan judul ini dilakukan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dari judul skripsi, sehingga perlu untuk menjelaskan uraian istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini “PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DUA MENTERI NO. 8 & 9 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN GEREJA DI WAY KANDIS KECAMATAN TANJUNG SENANG” Berikut uraian istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

Pandangan adalah bisa diartikan sebagai cara berpikir seseorang tetang sesuatu yang hal yang menurutnya benar.<sup>2</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat agama Islam.<sup>3</sup>

Surat Keputusan Bersama Menteri adalah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang dalam menjalankan urusan pemerintah sesuai dengan bidang yang ditangani oleh Menteri tersebut. SKB Menteri merupakan produk hukum yang dibuat oleh Menteri sebagai penyelenggara pemerintahan.

---

<sup>2</sup>Alwi, Hasan, dkk. 2007. *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka).hlm 61

<sup>3</sup>Abdul wahab khalaf, *kaidah-kaidah hukum Islam* (jakarta: PT. Raja grafindo persada, 1994, cetakan ke empat), hlm 154

Penyelenggaraan pemerintahan tidaklah lepas dari penggunaan kekuasaan pemerintah untuk mengatur warga negara sehingga tercapailah fungsi atau tugas pemerintahan itu sendiri.<sup>4</sup> Dalam hal ini SKB Menteri yang dimaksud ialah SKB 2 Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) Nomer 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Gereja dalam arti secara umum adalah sebuah Rumah Ibadah umat Kristen, dimana umat tersebut dapat berdoa atau bersembahyang.

Way Kandis adalah suatu kelurahan yang berada di kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bagaimana sebaiknya pendirian rumah ibadah itu dilakukan berdasarkan pandangan Hukum Islam dan SKB 2 Menteri No. 8 & 9 Tahun 2006 dalam hal ini ialah mengenai pendirian Gereja di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Pentingnya mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam dan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri No. 8 & 9 Tahun 2006

---

<sup>4</sup>Jurnal *Kedudukan dan Fungsi Surat Keputusan Bersama Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*, Nurhadi Saputra 2011

<sup>5</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Way\\_Kandis.\\_Tanjung\\_Senang](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Way_Kandis._Tanjung_Senang) , Bandar\_Lampung di akses pada tanggal 20-09-2018 pukul 19.00 WIB

terhadap pendirian rumah ibadah demi mencapai kemaslahatan dalam bermasyarakat dan kerukunan antar sesama umat beragama agar setiap umat beragama dapat menjangkan ibadah keagamanya ditempat ibadahnya secara nyaman sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini ialah pendirian rumah ibadah Gereja di Way Kandis Kec. Tanjung Senang.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Pokok bahasan judul ini berkaitan erat dengan disiplin ilmu di Fakultas Syari'ah jurusan Siyasah sehingga sesuai dengan ilmu yang penulis tekuni saat ini.
- b. Literatur dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini di mudahkan dengan adanya memperoleh informasi yang mendalam dan mengidentifikasi, mencermati pengetahuan yang ada sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

## C. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang luas dihuni oleh rakyat yang majemuk terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, dan lain-lainnya. Indonesia benar-benar *berbhineka*, tetapi *tunggal ika* dibawah konstitusi UUD 1945 yang pada *pembukaan*-nya tercantum Pancasila. Bangsa Indonesia yang sangat majemuk itu, secara politis, membentuk dan membina kesatuan hidup bersama berdasar UUD 1945. Naskah politik

UUD 1945 merupakan hasil kompromi dari pandangan-pandangan yang berbeda tentang dasar negara Indonesia.

Dengan pandangan yang luas dan pengertian yang mendalam, umat Islam Indonesia menerima UUD 1945, khususnya Pancasila yang tercantum pada *pembukaan*-nya, sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut H. Alamsjah Ratu Perwiranegara, penerimaan umat Islam akan Pancasila menurut rumusannya yang kompromistis itu, merupakan hadiah<sup>6</sup> umat Islam Indonesia bagi persatuan bangsa dan kemerdekaan Indonesia.

Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal jika berbicara tentang identitas Indonesia adalah pluralitas, kemajemukan yang bersifat multidimensional. Kemajemukan suku, ras, etnik golongan dan agama adalah warna dasar dan nafas yang membuat Indonesia memiliki nilai yang unik dan spesifik.

Kemajemukan atau Pluralisme itu sendiri tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat.

Menurut Nurkholis Madjid, Pluralisme adalah pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*). Bahkan menurutnya pula,

---

<sup>6</sup>H. Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Islam dan Pembangunan Politik di Indonesia* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1978) hlm. 178



pluralisme merupakan suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*). Kemajemukan dalam pandangan Madjid erat kaitannya dengan sikap penuh pengertian (toleran) kepada orang lain, yang nyata-nyata diperlukan dalam masyarakat yang majemuk. Secara teologis, tegas Madjid, kemajemukan sosial merupakan dekrit Allah untuk umat manusia.<sup>7</sup>

Dari adanya kemajemukan tersebut maka perlu adanya sikap saling toleransi saling menghargai antar sesama anggota masyarakat. Toleransi sendiri diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Dengan kata lain, pelaksanaannya hanya pada aspek-aspek yang detail dan teknis bukan dalam persoalan yang prinsipil. Dengan adanya toleransi maka akan dapat melestarikan persatuan dan kesatuan

---

<sup>7</sup> A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media Group) hlm. 227

<sup>8</sup> Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), hlm.22

bangsa mendukung dan menyukseskan pembangunan, serta menghilangkan kesenjangan.

Hazairin mengemukakan bahwa toleransi, yakni hidup berdampingan secara rukun dan damai antar umat pelbagai agama, termasuk ke dalam norma-norma sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang ikut mengokohkan pula hidup kesatuan bangsa dalam sila Persatuan Indonesia.<sup>9</sup> Dalam hidup berdampingan secara rutin dan damai itu, akan tersedia kesempatan untuk berlomba-lomba mewujudkan kebaikan di muka bumi. Toleransi antarumat pelbagai agama, menurut Hazairin, merupakan pula satu unsur inti bagi “hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan”. Jika suatu pihak ingin membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan agamanya yang hanya berlaku bagi pihaknya dan tidak mengganggu pihak lain, sikap terbuka dan tidak keberatan dari pihak lain itu termasuk dalam wujud toleransi.<sup>10</sup>

Bentuk toleransi yang harus ditegakkan ialah toleransi agama dan toleransi sosial. Toleransi agama adalah toleransi yang menyangkut keyakinan yang berhubungan dengan akidah yaitu sikap lapang dada untuk memberi kesempatan pemeluk agama selain Islam beribadah menurut ketentuan agama yang diyakininya. Sedangkan toleransi sosial berorientasi terhadap toleransi kemasyarakatan. Secara teknis pelaksanaan sikap toleransi beragama yang dilaksanakan di dalam masyarakat lebih banyak dikaitkan dengan kebebasan dan kemerdekaan menginterpretasikan serta

---

<sup>9</sup>Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta : Tintamas, 1973) hlm. 50

<sup>10</sup> Ibid.

mengekspresikan ajaran agama masing-masing. Masyarakat Islam memiliki sifat yang pluralistik dan sangat toleran terhadap berbagai kelompok sosial dan keagamaan, karena hidup bermasyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar hidup manusia agar tujuan hidup manusia dapat diwujudkan dan terbentuk suatu kehidupan berdasarkan persaudaraan, penuh kasih sayang dan harmoni.<sup>11</sup>

Salah satu sikap toleransi yang bisa kita tunjukkan ialah dengan menghargai adanya Pluralisme agama. Dalam Islam, batasan dan konsep pluralisme maupun toleransi antar umat beragama sudah sangat jelas. Prinsip persamaan kemanusiaan, di mana kehadiran dan martabat seseorang tidak dilihat dari geneologis, etnis dan kepemilikan material (hartawan), merupakan paradigma egalitarian dan pluralisme yang tidak hanya bersifat teoritis atau konsep semata, akan tetapi secara realitas juga telah dipraktikkan oleh umat Islam selama berpuluh-puluh tahun dalam kehidupan mereka.

Sebenarnya toleransi lahir dari watak Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dapat dengan mudah mendukung etika perbedaan dan toleransi. Al-Qur'an tidak hanya mengharapakan, tetapi juga menerima kenyataan perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Hujurāt ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

---

<sup>11</sup>Abdul Munir, *Pokok-pokok Ajaran NU*, Ramdhani, Solo, 1989, hlm. 50-51.

Artinya: *“Hai manusia sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*<sup>12</sup>

Ayat di atas menjadi dasar dalam memahami konsep ini, bahwa apapun etnis dan jenis kelaminnya ketika lahir ke dunia, manusia memiliki kedudukan yang sama, yang membedakan kehormatan mereka dalam pandangan Allah adalah sifat takwa, yakni kepatuhan menjalankan segala apa yang diperintahkan-Nya dan konsekuen dalam menjauhi semua larangan-Nya.

Toleransi dalam pergaulan hidup antara umat beragama yang didasarkan pada tiap-tiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu sendiri, mempunyai bentuk ibadah (ritual) dengan sistem dan cara tersendiri yang ditaklifkan (dibebankan) serta menjadi tanggung jawab orang yang memeluknya atas dasar itu. Maka toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan perwujudan sikap keberagamaan pemeluk suatu agama dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama, dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum.

Dalam hubungannya dengan pluralitas keagamaan Negara berkewajiban memfasilitasi masyarakat yang hidup di dalam wilayahnya

---

<sup>12</sup> Ahmad Muhammad, Yusuf. *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Quran dan hadits*, Jakarta: Widya Cahaya, Jilid 5



untuk dapat hidup rukun berdampingan. Pancasila sebagai dasar negara berusaha mewujudkan kerukunan penduduk termasuk di dalamnya kerukunan dalam beragama. Pancasila telah disepakati menjadi dasar negara dan berfungsi untuk mengayomi kemajemukan agama di Indonesia. Sila-sila dalam pancasila diperincikan lagi ke dalam Undang-Undang Dasar yang disebut UUD 1945 melalui pasal-pasal nya.

Negara menjamin kebebasan semua warga negaranya untuk melaksanakan kepercayaannya masing-masing seperti tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu".<sup>13</sup> Oleh karena itu rumah ibadah dan pelaksanaan ibadah umat beragama adalah hal yang penting dan mendasar bagi setiap umat beragama.

Dalam hal pendirian rumah ibadah pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama Dua Menteri sebagai acuan mendirikan rumah ibadah yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBMA dan MDN) No. 8 dan 9 Tahun 2006, selanjutnya disebut SKB 2 Menteri yang membahas tentang pendirian rumah ibadah agar kerukunan antar umat beragama terpelihara.

Dalam pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain itu juga harus memenuhi persyaratan khusus seperti Daftar nama dan Kartu Tanda

---

<sup>13</sup>UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, hlm 25

Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, rekomendasi tertulis dari kantor Departemen Agama kabupaten/kota, dan rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten/Kota.

Saat Islam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan konsekuensi tentu saja setiap orang bebas juga melaksanakan keyakinannya yakni beribadah menurut keyakinannya itu. Dan tentu saja setiap agama memiliki waktu dan tempat peribadatnya sendiri, maka tidak tepat pula rasanya jika terdapat larangan total untuk non muslim menggunakan fasilitas keagamaan mereka tersebut. Kalupun ada batasannya maka prinsip kebaikan (*al-birr*) dan keadilan (*al-adl*) harus menjadi acuannya. Sebagaimana Al-Quran menyatakan :

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ  
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (Q.S. Al-Mumtahanah: 8)<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Al-Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka, Penerbit Kalim, Al-Mumtahanah hlm 551

Saat kita membicarakan mengenai kebebasan beragama maka tidak terlepas pula dari adanya Hak Asasi Manusia. Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua manusia tanpa pandang bulu. Sebagai agama kemanusiaan, Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Manusia digambarkan oleh Al-Quran sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dimuliakan. Bersandar dari pandangan kitab suci ini, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam Islam tidak lain merupakan tuntutan dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemeluknya. Dalam Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Abu A'la al-Maududi, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen dan kekal.

Terdapat tiga bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam. *pertama*, hak dasar (hak *daruri*), sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengasara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Contoh sederhana hak ini di antaranya hak untuk hidup, hak atas keamanan, dan hak untuk memiliki harta benda. *Kedua*, hak sekunder, yakni hak-hak yang apabila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Misalnya, jika seseorang kehilangan haknya untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan berakibat hilangnya

hak hidup. *Ketiga*, hak tersier, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

Konsepsi Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama Islam, Al-Quran dan Hadis. Adapun implementasi HAM dapat dirujuk pada praktik kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan sebutan *sunnah* (tradisi) Nabi Muhammad. Tonggak sejarah peradaban Islam sebagai agama HAM adalah lahirnya deklarasi Nabi Muhammad yang biasa dikenal dengan Piagam Madinah.

Terdapat dua prinsip pokok HAM dalam Piagam Madinah. *Pertama*, semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa. *Kedua*, hubungan antara komunitas Muslim dengan nonmuslim didasarkan pada prinsip prinsip: (1) berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga; (2) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; (3) membela mereka yang teraniaya; (4) saling menasehati; (5) menghormati kebebasan beragama. Pandangan inklusif kemanusiaan Piagam Madinah kemudian menjadi semangat deklarasi HAM Islam di Kairo, deklarasi ini dikenal dengan nama deklarasi Kairo yang lahir pada 5 Agustus 1990.<sup>15</sup>

Dalam sebuah negara hukum, ada ciri khusus yang melekat pada negara tersebut, yaitu menjunjung tinggi posisi hak asasi manusia, kesetaraan dan kesamaan derajat antar satu dengan yang lainnya di

---

<sup>15</sup>A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media Group) hlm 165-167



samping berpegang teguh pada aturan-aturan, norma-norma yang telah ditetapkan dan diberlakukan bagi warga negaranya tanpa ada perkecualian.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-*bhinneka*. Kemajemukannya antara lain terletak pada keyakinan dan agama. Disamping agama-agama yang dianut di Indonesia seperti agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha ada pula aliran-aliran kepercayaan yang bersumber bukan pada ajaran agama, tetapi bersumber pada keyakinan yang tumbuh di kalangan masyarakat sendiri, yaitu kepercayaan yang oleh pemerintahan digolongkan kepada kepercayaan yang merupakan bagian dari kebudayaan.<sup>16</sup>

Kemajemukan masyarakat dalam hal agama tersebut merupakan sumber kerawanan sosial apabila pembinaan kehidupan beragama tidak tertata dengan baik. Agama adalah masalah yang peka, yang jika tidak tertanam saling pengertian dan toleransi di antara pemeluk agama yang berbeda-beda, mudah timbul pertentangan, bentrokan bahkan permusuhan antargolongan pemeluk agama. Oleh karena itu, di samping kebebasan beragama, perlu dilakukan langkah-langkah pembinaan yang ditunjukan untuk memelihara kerukunan hidup beragama.

Di dalam Piagam Madinah, terdapat rumusan-rumusan yang cukup jelas dan dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip dasar kerukunan hidup antarumat beragama. Pada pasal 25 disebutkan, bagi umat Yahudi agama mereka, dan bagi umat Islam agama mereka. Pasal ini memberikan dasar

---

<sup>16</sup>*Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama, Tahun Anggaran 1982/1983), hlm 31

kebebasan memeluk dan menjalankan ajaran agama yang dianut seseorang. Pada pasal 24, pasal 37 dan pasal 38 disebutkan kewajiban bersama golongan-golongan agama. Di dalam pasal-pasal ini dinyatakan bahwa golongan muslim dan golongan Yahudi sama-sama menanggung biaya perang melawan pihak yang menyerang Madinah, kota tempat tinggal bersama kedua golongan ini.

Muhammad saw. sebagai Rasul Allah menyampaikan seruan kepada semua umat manusia untuk mempercayai dan menerima *risalahnya*, termasuk golongan penganut agama Yahudi, tetapi tidak disertai paksaan. “tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam”. prinsip yang terkandung dalam Al-Quran ini (QS. Al-Baqarah (2): 256), tampaknya, tetap dipegang teguh sampai akhir hayatnya.

Piagam Madinah dan UUD 1945 sama-sama memuat ketentuan tentang dasar kerukunan hidup beragama. Artinya, para pemeluk agama yang berbeda harus hidup berdampingan secara damai. Agama yang berbeda tidak boleh dijadikan penghalang bagi kerukunan hidup di tengah masyarakat. Mengingat jumlah pemeluk agama di Indonesia jauh lebih besar dari zaman berlakunya Piagam Madinah, dan agama yang dianut bangsa Indonesia lebih banyak, serta sesuai dengan kemajuan dan kondisi zaman, serta tempat. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dan perlu bila pengaturan dan pembinaan kerukunan hidup beragama di Indonesia lebih terperinci dan lebih intensif dibanding dengan pada masa berlakunya Piagam Madinah.

Kalau kita membaca sejarah, maka kita akan menyaksikan bahwa dalam setiap penaklukan yang dilakukan oleh umat Islam selalu mengedepankan penghormatan pada agama setempat. Tidak ada pemaksaan untuk masuk Islam dan tidak ada penghancuran tempat-tempat peribadatan. Kalaupun ada itu hanya beberapa kasus saja. Karena itulah sampai saat ini kita masih bisa menyaksikan tempat-tempat peribadatan berbagai agama seperti kuil, gereja, dan lainnya di daerah-daerah yang dulunya dikuasai oleh kekhalifahan Islam.

Dalam hal keberagaman agama yang ada di Indonesia tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dari keberagaman tersebut bisa menimbulkan beberapa konflik agama salah satu contohnya ialah mengenai masalah pendirian rumah ibadah. Seperti yang terjadi dalam pembangunan rumah ibadah di lingkungan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang yang mayoritas pemeluknya muslim, terlihat adanya penolakan dari warga sekitar yang merasa ketentrannya terganggu. Pengguna rumah ibadah itu hanya satu dua dari warga sekitar, sebagian besar datang dari tempat lain yang berjauhan.

Banyak masalah yang akan muncul dari kehadiran orang asing di lingkungan itu, seperti masalah keamanan, keramaian, tempat parkir kendaraan, dan sebagainya. Pembangun tersebut sudah ada musyawarah terhadap warga sekitar pembangunan rumah ibadah dan sudah ada izin dari Walikota serta direkomendasi juga oleh kecamatan, kelurahan, dan ketua lingkungan yang ada di Way Kandis. Pendirian rumah ibadah

tersebut telah memenuhi syarat adanya persetujuan dari masyarakat sekitar lingkungan gereja yang telah mencukupi tetapi masih ada beberapa masyarakat yang menolak adanya pembangunan rumah ibadah karena rumah ibadah yang akan dibangun sangat luas.

Munculnya kasus terkait dengan persoalan keagamaan yang dipicu oleh beberapa hal antar lain :

1. Pelecehan atau penodaan agama melalui penggunaan simbol-simbol maupun istilah-istilah keagamaan dari suatu agama oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab.
2. Fanatisme agama, Fanatisme yang dimaksud adalah suatu sikap yang mau menang sendiri serta mengabaikan kehadiran umat beragama lainnya yang memiliki cara atau ritual ibadah dan paham agama yang berbeda.
3. Adanya diskomunikasi dan miskomunikasi anatar umat beragama. Konflik ini dapat terjadi karena adanya miskomunikasi (salah paham) dan diskomunikasi (komunikasi yang buruk).

Kebebasan berkeyakinan merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat sarat dengan universal HAM tentang kebebasan manusia untuk beragama atau sebaliknya. Karenanya, pemaksaan keyakinan beragama tidak saja bertentangan dengan prinsip HAM, tetapi juga tidak pernah diijarkan oleh Islam (QS. 2:256). Ajaran berdakwah dalam Islam harus dilakukan dengan cara-cara bijak dan dialogis, dan harus menghindari hal-hal yang bersifat menistakan ajaran, simbol, dan tokoh-tokoh agama lain.

Dalam perspektif membangun toleransi antar-umat beragama, ada lima prinsip yang bisa dijadikan pedoman semua pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari: (1) tidak satu pun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi jahat; (2) adanya persamaan yang dimiliki agama-agama, misalnya ajaran tentang berbuat baik kepada sesama; (3) adanya perbedaan mendasar yang diajarkan agama-agama. Di antaranya, perbedaan kitab suci, Nabi, dan tata cara ibadah; (4) adanya bukti kebenaran agama; dan (5) tidak boleh memaksa seseorang menganut suatu agama atau suatu kepercayaan.

Bersandar pada lima prinsip ini, hal yang harus lebih ditunjukkan oleh semua umat beragama adalah untuk melihat persamaan-persamaan dalam agama yang diyakini seperti dalam hal perdamaian dan kemanusiaan. Hal ini jauh lebih bermanfaat dari pada berketat dalam perdebatan akan hal-hal perbedaan dari ajaran agama dengan semangat menguji keyakinan sendiri dengan keyakinan orang lain. Perbedaan, dalam hal apapun, adalah rahmat Tuhan yang harus disyukuri, karena jika Tuhan menghendaki keseragaman, niscaya Dia dapat melakukannya. Perbedaan hendaknya dijadikan media untuk berlomba dalam lapangan kemanusiaan dan penegakan keadilan.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pandangan Hukum Islam dan SKB 2 Menteri terhadap pendirian rumah ibadah. Dengan permasalahan

---

<sup>17</sup> A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *op. Cit.*, hlm 169-170



tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam dan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri No. 8 & 9 Tahun 2006 terhadap Pendirian Gereja di Way kandis Kecamatan Tanjung Senang”

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Pendirian Gereja di Way Kandis Kec. Tanjung Senang ?
2. Bagaimana Pandangan SKB 2 Menteri terhadap Pendirian Gereja di Way Kandis Kec. Tanjung Senang ?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam tentang Pendirian Gereja di Way Kandis Kec. Tanjung Senang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan SKB 2 Menteri terhadap pendirian Gereja di Way Kandis Kec. Tanjung Senang.

Adapaun Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk warga masyarakat baik muslim dan non muslim lebih memahami lagi bahwa ada beberapa prosedur dalam melaksanakan pendirian rumah ibadah dalam SKB 2 Menteri serta untuk seluruh masyarakat lebih bersikap saling toleransi

kepada sesama umat bergama agar terciptanya kerukunan, ketentraman dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat.

## 2. Manfaat secara Praktis

Hasil dari penulisan skripsi ini nantinya mampu diaplikasikan secara nyata oleh individu-individu maupun lembaga-lembaga yang secara khusus menangani masalah dalam Pendirian Rumah Ibadah.

## F. Metode Penelitian

Agar sistematisnya dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode yang digunakan adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengadakan penelitian dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian.<sup>18</sup> Penelitian ini termasuk jenis kualitatif yang menampilkan data penelitian dengan kata-kata.

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang di angkat untuk diteliti.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>18</sup> Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975. Hlm 2

Data yang diperoleh sebagai data yang sudah ada, yang dianalisis secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa dalam masa sekarang. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pandangan Hukum Islam dan SKB 2 Menteri No. 8 & 9 tahun 2006 tentang Pendirian Gereja.<sup>19</sup>

### 3. Data dan Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli akan tetapi refrensinya masih relevan dengan kajian yang dibahas.<sup>20</sup>

#### a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai informasi yang dicari. Data primer dari penelitan ini adalah hasil wawancara serta informasi dari pihak Ketua Panitia Pendirian Gereja, tokoh masyarakat, aparat desa, dan masyarakat sekitar yang ada di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>19</sup>Lexy J.Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke 22, (Bandung: Raja Resdakarya, 2004) hlm.174

<sup>20</sup>Lois Gootschalk, *Understanding, History, A Primer Of Histrical Method*, Terjemah Nugroho Noto Susanto, UI Press, 1985, hlm.32

Data Sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya asli. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kali ini ada 2 teknik dalam pengumpulan data yaitu Populasi dan Sampel. Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat selain non muslim yang tinggal di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan obyek yang menjadi sasaran. Sedangkan Sampel yaitu sekumpulan atau sebagian dari urutan populasi yang diperoleh melalui proses sampling tertentu.<sup>21</sup> Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive*. Sampling adalah pengambilan sampel yang bersifat tidak acak, dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan pertimbangan tertentu.<sup>22</sup>

Teknik pengumpulan data ini menggunakan beberapa metode, yaitu:

##### a. Observasi

---

<sup>21</sup> Sedamayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung; Mandar Maju, 2002), hlm.72

<sup>22</sup> Nasri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta; Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota Ikapi, 2006), hlm.155

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan *setting* kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>23</sup>

b. Interview

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Interview ini untuk memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.<sup>24</sup> dalam hal ini melakukan wawancara dengan pihak Ketua Panitia Pendirian Gereja, tokoh masyarakat, aparat desa, dan beberapa masyarakat di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang.

c. Studi dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.<sup>25</sup> Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pertanyaan tertulis disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti dan membuka kesepakatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang di selidiki.

---

<sup>23</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 58

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm 59

<sup>25</sup> Joko Subagyo, *Metodelogi penelitian dalam teori dan praktek* (Jakarta: PT, Rineke cipta 2004) hlm.106



## 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian.

- a. Editing adalah pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh pengumpul data.<sup>26</sup>
- b. Sistematis data adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

## 6. Metode Analisis Data Komparatif

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu pandangan Hukum Islam dan SKB 2 Menteri tentang pendirian Gereja, yang dikaji dengan menggunakan metode kualitatif.<sup>27</sup> Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pendirian rumah ibadah Gereja. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang Hukum Islam yaitu agar memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman tentang mengenai Pendirian rumah ibadah Gereja, mengacu pada SKB 2 Menteri dan pandangan Hukum Islam.

---

<sup>26</sup>Susiadi AS,M.Sos.I, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Intitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm 115

<sup>27</sup>*Op\_Cit.* hlm 182

Metode berpikir dalam penulisan menggunakan metode berpikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang memperelajari suatu gejala yang khusus mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan sistem Pendirian Rumah Ibadah Gereja. Ditinjau dari pandangan Hukum Islam dan SKB 2 Menteri. Analisis yang dituangkan dalam bab-bab keseluruhannya dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



## BAB II

### ATURAN HUKUM ISLAM DAN SKB 2 MENTERI NO. 8 & 9 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH

#### A. Pengertian Rumah Ibadah dan Macam-Macamnya

Rumah Ibadah adalah suatu tempat yang dipergunakan oleh seorang hamba untuk beribadah kepada Tuhan-Nya sebagai bentuk ketaatan dan patuh kepada setiap aturan-aturannya sebagaimana yang diajarkan dalam setiap agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing.<sup>28</sup>

Pengertian tempat ibadah merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepada Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.<sup>29</sup>

Melihat konteks di Indonesia yang pada faktanya memiliki keberagaman agama maka dari itu di Indonesia juga terdapat berbagai

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm.671

<sup>29</sup> SKB 2 Menteri No. 8 dan 9 tahun 2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepada Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah*

macam tempat peribadatan atau tempat ibadah setiap umat beragama. Di Indonesia sendiri ada enam agama yang telah diakui diantaranya yaitu Islam, Kristen katolik dan Protestan, Hindu, Budha, Konghucu. Berikut ini penjelasan macam-macam Rumah Ibadah yang ada di Indonesia :

### 1. Masjid

Masjid adalah rumah Allah, tempat umat Islam menjalin pertalian ruhaniyah dengan Allah SWT (*hablu minallah*), Tuhan semesta alam. Melalui perlambangan *takbir*, *tahmid*, *ruku'* dan *sujud* dalam sholat kita nyatakan ketundukan dan kepasrahan diri kepada kehendak dan perintah-Nya. Masjid adalah rumah Allah, tempat di mana umat Islam menjalin hubungan dengan sesama (*hablu minannas*), secara lahir batin, merajut persaudaraan sejati sesama hamba, makhluk yang paling dimuliakan-Nya. Persaudaraan sejati seperti ini adalah modal yang sangat kokoh untuk misi kekhalifahan manusia untuk mewujudkan kesejahteraan, kemajuan dan keadilan bagi semua.<sup>30</sup>

Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah sholat yang mengayomi serta membina umat atau jamaah sekitar masjid, maka fungsi masjid akan berdampak positif bagi kehidupan jamaah. Masjid juga berfungsi sebagai tempat pembinaan kegiatan umat yang perkembangannya dari masa zaman Rasulullah SAW sampai saat ini memegang peran yang sangat penting. Hal ini ditandai dengan adanya suatu budaya yang telah mengakar dalam

---

<sup>30</sup>Masdar Farid Mas'udi, *Membangun NU Berbasis Masjid dan Umat* (Jakarta: Lajnah Takmir Masjid Nahdatul Ulama –LTMNU,2007), hlm.10

kehidupan masyarakat umat Islam yang pertama dan utama adalah didirikannya masjid.

## 2. Gereja

Gereja (bahasa Portugis: *igreja* dan bahasa Yunani: *ekklesia*) adalah suatu kata bahasa Indonesia yang berarti suatu perkumpulan atau lembaga dari penganut Kristiani. Istilah Yunani *ekkanoia*, yang muncul dalam perjanjian baru di Alkitab Kristen biasanya diterjemahkan sebagai jemaat. Istilah ini muncul dalam 2 ayat dari Injil Matius, 24 ayat dari kisah para Rasul, 58 ayat dari surat Rasul Paulus, 2 ayat dari surat kepada orang Ibrani, 1 ayat dari Surat Yakobus, 3 ayat dari Surat Yohanes yang ketiga, dan 19 ayat dari Kitab Wahyu.

Secara etimologi gereja berasal dari bahasa Portugis: *Igreja*, yang berasal dari bahasa Yunani: *ekklesia*, yang berarti dipanggil keluar (*ek*: keluar; *klesia* dari kata *kaleo*-memanggil); kumpulan orang yang dipanggil ke luar dari dunia memiliki beberapa arti: arti pertama ialah umat, atau lebih tepat, persekutuan orang Kristen. Arti ini diterima sebagai arti pertama bagi orang Kristen. Jadi, gereja pertama-tama bukanlah sebuah gedung. Arti kedua adalah sebuah perhimpunan atau pertemuan ibadah umat Kristen. Bisa bertempat di rumah kediaman, lapangan, ruangan di hotel, maupun tempat rekreasi. Arti ketiga ialah mazhab (aliran) atau denominasi dalam agama Kristen. Gereja Katolik, Gereja Protestan, dan lain-lain. Arti keempat ialah lembaga (administratif) dari pada sebuah mazhab Kristen. Arti terakhir dan juga arti umum adalah sebuah rumah



ibadah umat Kristen, di mana umat bisa berdoa atau bersembahyang. Gereja (untuk arti yang pertama) terbentuk 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus pada hari raya Pentakosta, yaitu ketika Roh Kudus yang dijanjikan Allah diberikan kepada semua yang percaya pada Yesus Kristus.<sup>31</sup>

Gereja adalah gedung atau rumah tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen dan Badan atau Organisasi umat Kristen yang sama kepercayaan, ajaran dan tata caranya baik itu Kristen Katolik dan Protestan.<sup>32</sup> Jadi Gereja adalah rumah, tempat ibadah atau persekutuan atau tempat berdoa dan tempat untuk melakukan upacara yang sama kepercayaan, ajaran dan tata caranya (Katolik dan Protestan).

### 3. Pura

Pura merupakan tempat suci Umat Hindu. Pura biasanya didirikan di tempat yang sekelilingnya asri seperti laut, gunung, goa, hutan dan sebagainya. Penyebutan nama tempat suci dalam ajaran Hindu tidak secara gamblang. Tempat suci atau pemujaan ini disebut *ldevalaya*, *devasthana*, *deval* atau *deul* yang berarti rumah para dewa. Tempat suci menurut Hindu mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu tempat suci karena kondisi alam (sendirinya) dan tempat suci karena disucikan atau dibangun. Tempat suci karena sendirinya adalah puncak gunung, sumber mata air. Sedangkan tempat suci yang dibangun adalah Pura.

---

<sup>31</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Gereja> diakses pada tanggal 29 april 2018, pukul 14:47.

<sup>32</sup> J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, hlm 272

Pura adalah istilah tempat ibadah agama Hindu di Indonesia. Secara *etimologi* kata pura berasal dari akhiran bahasa *sansekerta* (-pur, -puri, -puram, -pore), yang artinya adalah kota, kota berbenteng atau kota dengan menara atau istana. Pada awalnya, istilah pura berasal dari bahasa *sansekerta*, yang berarti kota atau benteng yang sekarang artinya berubah menjadi tempat pemujaan *Sang Hyang Widhi*. Sebelumnya, tempat suci atau tempat pemujaan disebut *Kahyangan* atau *Hyang*. Dalam perkembangannya di pulau Bali, istilah 'Pura' menjadi khusus untuk tempat ibadah, sedangkan kata 'puri' menjadi tempat tinggal bagi para raja dan bangsawan.

Pura sebagai tempat pemujaan dimulai pada jaman sebelum Dalem Kepakisan, Rsi Markandeya mendirikan Pura Besakih. Pada abad XI Empu Kunturan mempopulerkan Pura dengan Pura Kahyangan Tiga (Pura Desa, Puseh dan Dalem) dan tempat memuja sang Hyang Widhi yang disebut Meru. Pada jaman Dang Hyang Dwi Jendra, tempat memuja sang Hyang Widhi disebut Padmasana.

Pura berfungsi sebagai tempat suci Umat Hindu di Indonesia. Pura merupakan tempat pemujaan Hyang Widhi Wasa dalam prabawa-Nya (manifestasiNya) dan atau Atma Sidha Dewata (roh suci leluhur) dengan sarana upacara yadnya dari Tri Marga. Dalam Buku Materi Pokok Acara Agama Hindu disebutkan bahwa Pura sebagai tempat suci Umat Hindu memiliki arti dan fungsi yang sangat penting yaitu:

- a. Tempat untuk memuja Tuhan dengan segala manifestasinya.

- b. Tempat umat mendekatkan diri dengan Sang Pencipta yaitu Tuhan.
- c. Tempat dialog atau komunikasi sosial masyarakat dan tempat persaksian atau suatu aktivitas.
- d. Tempat mengasah dan mendidik calon-calon pemimpin masyarakat.

Menurut Gusti Ngurah Rai, fungsi Pura dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok yaitu Fungsi Spiritual, Fungsi Pendidikan dan Fungsi Sosial.

#### 4. Vihara

Vihara merupakan tempat umum bagi umat Budha untuk melaksanakan segala macam bentuk upacara atau kebaktian keagamaan menurut keyakinan dan kepercayaan agama Budha.<sup>33</sup> Vihara biasanya berarsitektur India atau Thailand, ada pula yang berarsitektur Tiongkok. Di Vihara tidak ada tempat untuk membakar kertas sembahyang.

Sebuah tempat dikatakan Vihara apabila memiliki minimal satu ruang *dhammasala* (ruang kebaktian), memiliki kuti (tempat tinggal bikksu), perpustakaan, bahkan ruang khusus untuk khotbah. Vihara yang lebih kecil disebut *Cetya* yang hanya memiliki 1 ruang *dhammasala* dan perpustakaan. Vihara yang lebih besar dan memiliki taman disebut *Arama*. Vihara bisa disebut *Arama* apabila memiliki minimal 1 ruang *dhammasala*, kuti, perpustakaan, ruang khotbah dan yang paling penting taman. Vihara biasanya diberi nama dari bahasa pali atau Sansekerta misalkan Vihara Dharma Ramsi.

---

<sup>33</sup>Peraturan Departemen Agama RI Nomor H III/BA,01.1/03/1/1992, Bab.II,2.

## 5. Kelenteng

Istilah Kelenteng berasal dari suara yang terdengar dari bangunan suci tersebut saat sedang menyelenggarakan upacara sembahyang yaitu *klinting-klinting* atau *klonteng-klonteng*. Seperti tempat beribadah lain Kelenteng juga memiliki tata cara keagamaan. Kelenteng memakai tata upacara yang berlandaskan tata agama Konghucu. Sebab segala peraturan dan perlengkapan sembahyang yang berada didalamnya berpedoman pada tata agama dan tata laksana upacara yang ada di *Konghucu Bio* atau *Bun Bio*.<sup>34</sup>

### B. Aturan Rumah Ibadah menurut Hukum Islam

Sebelum mengkaji bagaimana aturan rumah ibadah dalam hukum Islam, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam menanggapi adanya hal kemajemukan yang terjadi dalam suatu negara sudah dialami sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa klasik Islam, umat Islam dibawah pimpinan Muhammad SAW membentuk kesatuan hidup bersama golongan lain berdasarkan Piagam Madinah.

Sejarah menunjukan bahwa Nabi Muhammad SAW dan umat Islam, selama kurang lebih 13 tahun di Mekah terhitung sejak pengangkatan Muhammad SAW sebagai Rasul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah. Umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 M hijrah ke Madinah, kota sebelumnya disebut Yasrib. Kalau di Mekah

---

<sup>34</sup>Asti Kleinsteuber, *Klenteng-Klenteng Kuna Indonesia* , 2010, hlm.10

sebelumnya mereka merupakan umat lemah yang tertindas, di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri.<sup>35</sup>

Di tengah kemajemukan penghuni kota Madinah itu, Muhammad SAW berusaha membangun tatanan hidup bersama, mencakup semua golongan yang ada di kota Madinah. Sebagai langkah awal, ia mempersaudarakan antara para muslim pendatang dan muslim Madinah. Persaudaraan (*al-mu'akhah*)<sup>36</sup> itu bukan hanya tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, tetapi demikian mendalam, sampai ke tingkat saling mewarisi. Kemudian diadakan perjanjian hidup bersama secara damai di antara berbagai golongan yang ada di Madinah, baik di antara golongan-golongan Islam, maupun golongan-golongan Yahudi.

Kesepakatan-kesepakatan antara golongan Muhajirin dan Anshar, dan perjanjian dengan golongan-golongan Yahudi itu, secara formal, ditulis dalam suatu naskah yang disebut *shahifah* (piagam), yang dalam literatur bahasa Inggris diterjemahkan dengan *document*. *Shahifah* tersebut oleh para ilmuwan diberi nama *The Constitution of Medina, agreement, treaty, piagam* dan sebagainya.

Dalam hal kebebasan beragama pada zaman Rasulullah pun sudah diatur di dalam Piagam Madinah pada pasal 25 Piagam Madinah disebutkan “bagi orang-orang Yahudi, agama mereka dan bagi orang-

---

<sup>35</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985) cet. ke-5, jilid 1. hlm. 92.

<sup>36</sup>Ahmad al-Ainiyy, *Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari* (Mishr: Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1972) cet. Pertama, juz 18, hlm.190



orang Islam agama mereka”. Pasal ini memberikan jaminan kebebasan beragama. Di antara wujud kebebasan beragama itu adalah beribadat menurut ajaran agama masing-masing. Pada pasal ini juga dinyatakan bahwa kaum Yahudi adalah satu umat bersama kaum mukminin. Penyebutan demikian, mengandung arti bahwa (dilihat dari kesatuan atas dasar agama) orang-orang Yahudi merupakan satu komunitas yang paralel dengan komunitas kaum mukminin. Kebebasan beragama yang ditetapkan dalam Piagam Madina itu, tampaknya lebih dulu dari turunnya firman Allah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ  
بِاللهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).  
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah.  
Karena itu barang siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada  
Allah maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kuat yang  
tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Al-Baqarah: 256

Ayat ini diturunkan bersamaan waktunya dengan pengusiran kaum Yahudi Bani Nadir,<sup>37</sup> kaum yang diusir dari Madinah sesudah Bani Qaynuqa’. Piagam Madinah ditetapkan sebelum peristiwa pengusiran tersebut. Ayat 256 surah Al-Baqarah tersebut “hanya berkaitan dengan

---

<sup>37</sup>Al-Wahadi, *Asbab Nuzul Al-Quran* (t.tp. : Dar al-Qiblah li al-Saqafah al-Islamiyyah. 1984) cet. Ke-2, hlm. 76-77

kebebasan memilih agama Islam atau lainnya.”<sup>38</sup> Dan agama pilihannya adalah satu paket,<sup>39</sup> dalam artian setelah seseorang memilih satu agama, ia terkait oleh keseluruhan ajaran agama yang dipilihnya.

Muhammad saw tidak memaksa rakyat untuk mengubah agama. Ia hanya mendakwahkan Islam. soal konversi ke agama Islam tergantung kepada kesadaran mereka. Kebijakan demikian berbeda dengan yang terjadi di Bizantium. Kerajaan Bizantium memaksakan paham agama yang dianut pihak kerajaan kepada rakyat yang berbeda di bawah pemerintahannya. Rakyat merasakan kemerdekaan beragama hilang. Hal demikian menimbulkan rasa tidak senang rakyat terhadap pemerintah Bizantium.<sup>40</sup>

Pada pasal 20 disebutkan “orang musyrik di Madinah tidak boleh melindungi jiwa dan harta orang-orang Musyrik Qurays”. Disebutkan kata musyrik pada pasal ini mengandung pengakuan akan adanya penganut paganisme yang memang merupakan bagian terbesar dari warga Madina pada permulaan Muhammad berada di Madinah. Dalam Piagam Madinah mereka tidak dinyatakan sebagai musuh orang-orang Islam. kepada mereka disampaikan dakwah tidak disertai paksaan.

Dalam kenyataannya, selama Muhammad saw hidup, tidak pernah terjadi perang disebabkan semata-mata karena perbedaan agama, termasuk orang musyrik sekalipun. Semua tindakan kekerasan dan perang yang

---

<sup>38</sup>M. Quraish Shihab, “*Membumikan Al-Quran*” (Bandung: Mizan, 1992) cet. I, hm 368

<sup>39</sup>Ibid hlm. 397.

<sup>40</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985) cet ke-5, Jilid I, hlm.60

dilakukan Muhammad saw karena pengkhianatan politik. Orang-orang musyrik Madinah tidak ada yang diperangi oleh Muhammad disebabkan karena mereka menyembah berhala. Ada beberapa kelompok norma dipatahkan kekuatannya, bukan karena mereka musyrik, tetapi karena membunuh utusan Muhammad saw., untuk mengajarkan agama. Peperangan yang terjadi berkali-kali dengan kaum musyrikin Qurays Mekah disebabkan karena sikap permusuhan mereka, bukan karena disebabkan agama mereka.<sup>41</sup>

Amnesti umum yang diberikan Muhammad saw kepada warga Mekah sesudah Mekah dikuasai, merupakan bukti bahwa ia berperang melawan mereka bkan disebabkan karen mereka musyrik, tetapi mereka memusuhinya. Semua kelompok Yahudi yang diperanginya disebabkan mereka melakukan pengkhianatan politik, dan bukan karena mereka beragama Yahudi. Dapat disimpulkan bahwa, orang-orang musyrik dan Yahudi yang diperangi Muhammad saw adalah orang-orang musyrik dan Yahudi yang memusuhi Muhammad saw. Jadi penyebab perang dengan mereka adalah masalah politik, dan bukan semata-mata karena berbeda agama.

Dalam kehidupan bersama itu, komunitas Yahudi bebas dalam melaksanakan agama mereka.<sup>42</sup> Islam memang menunjukkan sikap toleran terhadap agama lain. Orang Islam, Yahudi dan Kristen masing-masing

---

<sup>41</sup> Abd al-Wahhab Khallaf di dalam bukunya *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Al-Qahirah: Dar al-Anshar, 1977) hlm. 62-84

<sup>42</sup> W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought* (Edinburg: Edinburg Universitu Press, 1980) hlm 241

mempunyai kebebasan yang sama dalam menganut kepercayaan, kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan menjalankan propaganda agama. Kebebasan beragama itu tampak pula dalam pertemuan tiga agama di Madinah, yaitu agama Islam, Yahudi, dan Nasrani.

Saat kita membicarakan mengenai kebebasan beragama maka tidak terlepas pula dari adanya Hak Asasi Manusia. Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua manusia tanpa pandang bulu. Sebagai agama kemanusiaan, Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Manusia digambarkan oleh Al-Quran sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dimuliakan. Bersandar dari pandangan kitab suci ini, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam Islam tidak lain merupakan tuntutan dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemeluknya. Dalam Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Abu A'la al-Maududi, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen dan kekal.

Menurut kalangan ulama Islam, terdapat dua konsep tentang hak dalam Islam: hak manusia (*haq al insan*) dan hak Allah. Satu dan lainnya saling terkait dan saling melandasi. Hak Allah melandasi hak manusia demikian juga sebaliknya, sehingga dalam praktiknya tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Misalnya, dalam pelaksanaan hak Allah berupa ibadah sholat, seorang muslim yang taat memiliki kewajiban untuk

mewujudkan pesan moral ibadah sholat dalam kehidupan sosialnya. Ucapan mengagungkan nama Allah (takbir) di awal sholat dan ucapan salam (kesejahteraan) di akhir sholat adalah tuntutan bagi setiap muslim untuk menebar keselamatan bagi orang sekelilingnya atas dasar keagungan Allah. Dengan ungkapan lain, hak Tuhan dan hak manusia dalam Islam terkandung dalam ajaran ibadah sehari-hari. Islam tidak memisahkan antara hak Allah dan hak manusia.

Adapun hak manusia, seperti hak kepemilikan, setiap manusia berhak untuk mengelola harta yang dimilikinya. Namun demikian, Islam menekankan bahwa pada setiap hak manusia terdapat hak Allah; meskipun seseorang berhak memanfaatkan hartanya, tetapi ia tidak boleh menggunakan harta keluarganya untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Allah. Keadilan sebagai inti ajaran, Islam menekankan bahwa hak kepemilikan harus memiliki nilai sosial. Harta kekayaan dalam Islam harus diorientasikan bagi kesejahteraan umat manusia. Hal ini didasari oleh pandangan teologis bahwa hanya Allah-lah satu-satunya pemilik absolut harta yang ada ditangan manusia. Kewajiban mengeluarkan zakat bagi setiap Muslim yang mampu merupakan contoh lain dari ajaran Islam tentang kepedulian sosial yang harus dijalankan oleh pemeluk Islam.

Wacana HAM bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban Islam. Para ahli Islam mengatakan wacana HAM dalam Islam jauh lebih awal dibandingkan dengan konsep HAM yang muncul di Barat. Menurut mereka, Islam datang dengan membawa pesan universal HAM.



Menurut Maududi, ajaran tentang HAM yang terkandung dalam *Piagam Magna Charta* tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam di negeri Arabia.

Terdapat tiga bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam. *pertama*, hak dasar (hak *daruri*), sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengasara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Contoh sederhana hak ini di antaranya hak untuk hidup, hak atas keamanan, dan hak untuk memiliki harta benda. *Kedua*, hak sekunder, yakni hak-hak yang apabila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Misalnya, jika seseorang kehilangan haknya untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan berakibat hilangnya hak hidup. *Ketiga*, hak tersier, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

Konsepsi Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama Islam, Al-Quran dan Hadist. Adapun implementasi HAM dapat dirujuk pada praktik kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan sebutan *sunnah* (tradisi) Nabi Muhammad. Tonggak sejarah perdaban Islam sebagai agama HAM adalah lahirnya deklarasi Nabi Muhammad yang biasa dikenal dengan Piagam Madinah.

Terdapat dua prinsip pokok HAM dalam Piagam Madinah. *Pertama*, semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa. *Kedua*, hubungan antara komunitas Muslim dengan

nonmuslim didasarkan pada prinsip prinsip: (1) berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga; (2) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; (3) membela mereka yang teraniaya; (4) saling menasehati; (5) menghormati kebebasan beragama. Pandangan inklusif kemanusiaan Piagam Madinah kemudian menjadi semangat deklarasi HAM Islam di Kairo, deklarasi ini dikenal dengan nama deklarasi Kairo yang lahir pada 5 Agustus 1990.

Disemangati oleh pesan inklusif Piagam Madinah, lahirnya deklarasi Kairo mengandung ketentuan HAM sebagai berikut: (1) Hak persamaan dan kebebasan; (2) Hak hidup; (3) Hak perlindungan diri; (4) Hak kehormatan pribadi; (5) Hak berkeluarga; (6) Hak kesetaraan wanita dengan pria; (7) Hak anak dari orangtua; (8) Hak mendapatkan pendidikan; (9) Hak kebebasan beragama; (10) Hak kebebasan mencari suaka; (11) Hak memperoleh pekerjaan; (12) Hak memperoleh perlakuan sama; (13) Hak kepemilikan; dan (14) Hak tahanan dan narapidana.<sup>43</sup>

Pandangan fikih tentang tempat ibadah non muslim. Dalam menanggapi hal ini, para ulama mengklasifikasikannya berdasarkan pertimbangan daerah dan tempat di mana rumah ibadah tersebut dibangun. Para ulama memetakan daerah tersebut menjadi tiga bagian. *Pertama*, daerah yang sejak awal dibangun oleh umat Islam. *Kedua*, daerah yang ditaklukan umat Islam melalui jalur diplomasi dan perdamaian. *Ketiga*,

---

<sup>43</sup>A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media Group) hlm 165-167

daerah yang ditaklukan umat islam dengan kekuatan militer dan peperangan. Berikut penjelasannya :

Daerah yang sejak awal dibangun umat Islam, daerah ini biasa disebut dengan kotanya umat Islam. terjadi kesepakatan di antara empat imam mazhab mengenai pelarangan membangun atau mendirikan tempat ibadah bagi umat non-muslim di daerah ini. Bahkan imam Hanafi mengklaim hal ini sebagai konsesus seluruh ulama (*ijma'*). Meski demikian, perlu dicatat bahwa hukum ini adalah hukum mentah yang belum tentu dapat dipraktekkan di segala kondisi. Sebab, antara menghukumi sesuatu dan menerapkannya adalah dua hal yang sangat berbeda. Sehingga, belum tentu secara hukum fikih haram kemudian dalam penerapannya menjadi tidak boleh.

Dalam tataran hukum *taklifi* yang berjumlah lima hukum (*wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah*) sangat terikat erat dengan hukum *wadh'iy* (*sebab, syarat, sah dan fasad*) yang menentukan keberlangsungan serta eksistensinya. Dalam konteks ini, apabila melarang umat non muslim mendirikan rumah ibadahnya akan mengakibatkan kekacauan dibandingkan membiarkannya, maka membiarkan dan membebaskan mereka untuk membangun tempat ibadahnya adalah sikap yang harus dipilih.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Syarh *Shaghir* kitab fikih muktabar Madzhab Maliki. Dalam konteks di Indonesia dengan segala kemajemukan serta tingkat intoleransinya yang

akhir-akhir ini cukup menanjak melarang mereka untuk membangun rumah ibadah bukan hanya berakibat fatal yang dapat mengakibatkan terjadinya diintegrasi bangsa, namun juga berdampak perlakuan diskriminatif yang akan menimpa umat Islam di daerah minoritas.

Daerah yang ditaklukan umat Islam melalui jalur Perjanjian, Diplomasi atau Perdamaian. Apabila yang disepakati dalam perjanjian daerah ini tetap menjadi milik masyarakat non-muslim dan mereka bersedia membayar pajak tanah kepada pemerintah, maka mereka dibebaskan membangun tempat ibadahnya. Sementara jika dalam kesepakatan perjanjian daerah ini menjadi milik umat muslim dan masyarakat non-muslim bersedia membayar *jizyah* kepada pemerintah, maka mereka boleh membangun tempat ibadahnya apabila mereka mensyaratkan diperbolehkan.

Sementara menurut Madzhab Maliki mereka boleh mendirikan tempat ibadahnya secara mutlak. Baik ada persyaratan atau tidak selama di daerah tersebut tidak dihuni umat muslim. Namun menurut Imam Ibnu Qasim salah seorang ulama Madzhab Maliki, di daerah ini mereka dibebaskan untuk mendirikan tempat ibadahnya baik ada persyaratan atau tidak, baik di daerah ini ada umat muslimnya atau tidak. Sementara rumah ibadah yang sudah ada sejak sebelum daerah ini ditaklukan, maka harus tetap dipertahankan, dilindungi, dan tidak boleh dirusak selama ada persyaratan dari mereka yang menginginkan hal itu.

Daerah yang ditaklukan dengan kekuatan militer dengan peperangan. Para ulama sepakat bahwa daerah ini non muslim tidak diperbolehkan membangun rumah ibadahnya. Sebab dengan ditaklukan daerah ini dengan peperangan maka secara otomatis daerah ini menjadi harta *ghanimah* yang menjadi milik umat Islam. sedangkan rumah ibadah yang sudah ada sebelum penaklukan harus tetap dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk dirusak.<sup>44</sup>

Tidak ada aturan khusus mengenai pendirian rumah ibadah dalam hukum Islam akan tetapi Islam sendiri tidak melarang adanya bangunan peribadatan non-muslim di wilayah muslim apabila sebelumnya telah terjadi perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan mengenai hal tersebut. Dalam Islam juga diajarkan adanya rasa toleransi dan bersikap adil karna kalau melihat konteks di Indonesia yang memang pada faktanya memiliki bermacam-macam agama. Di Indonesia sendiri masalah mengenai Pendirian Rumah Ibadah diatur dalam SKB 2 Menteri No. 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepada Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

### **C. Aturan Rumah Ibadah menurut SKB 2 Menteri**

Secara konstitusional, kehidupan beragama di Indonesia diberi dasar dalam UUD 1945, baik pada Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasannya. Pancasila dirumuskan pada pembukaan UUD 1945, yang

---

<sup>44</sup>Hamim HR, *Rumah Ibadah Non-muslim dalam Pandangan Fikih Klasik*, Artikel, 15 juni 2017



silanya pertama adalah “Ketuhanan yang Maha Esa”. Di dalam Batang Tubuh ada Bab XI yang berjudul Agama, memuat Pasal 29 yang berisi dua ayat. Dalam penjelasan UUD 1945, sehubungan dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa terdapat penjelasan: “Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.”

Pemeliharaan budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral yang luhur, tentu tidak dapat dilepaskan dari usaha pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama bangsa Indonesia. Dalam rangka usaha pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama di seluruh wilayah Negara RI itu, pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, melainkan sekaligus menjamin, melindungi, membina, mengembangkan, serta memberikan bimbingan dan serasi dengan kebijaksanaan pemerintah dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.<sup>45</sup> Presiden Soeharto pernah menegaskan bahwa sasaran utama dari pembangunan kehidupan beragama adalah pembinaan kerukunan hidup beragama. Tanpa kerukunan hidup beragama tidak mungkin tercipta

---

<sup>45</sup> Nurcholis Madjid, *Islam: Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: yayasan Wakaf Para Madina, 1992) cet. Pertama hlm 4

kerukunan nasional yang menjadi prasyarat persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>46</sup>

Dalam rangka pembinaan kerukunan hidup beragama, Menteri Agama (H. Alamsjah Ratu Perwiranegara)<sup>47</sup> menetapkan “Tiga Kerukunan Hidup Beragama,” yaitu: (1) Kerukunan Intern Umat Beragama; (2) Kerukunan antar umat Beragama; dan (3) Kerukunan antara Umat Beragama dan Pemerintah.<sup>48</sup>

Di antara kebijakan guna memelihara kerukunan hidup beragama itu, ia menetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978.<sup>49</sup> Yang disebut pertama berisi pedoman penyiaran agama. Yang disebut berikutnya tentang bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia.

Apabila isi dua keputusan Menteri Agama tersebut dipatuhi, selain kerukunan antarumat beragama akan terpelihara, tiap golongan beragama dapat mencurahkan perhatiannya terhadap pembinaan dan peningkatan kualitas warga golongannya masing-masing. Bagi umat Islam hal ini sangat diperlukan, karena jumlah yang besar memerlukan langkah-langkah pembinaan berkesinambungan dalam suasana yang tenang dan damai.

Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa kualitas internal umat beragama akan meningkat dan hubungan eksternal antarumat beragama

---

<sup>46</sup> Ibid, hlm 6

<sup>47</sup> Ia Menjabat Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan III, tahun 1978-1983

<sup>48</sup> *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama, Tahun Anggaran 1982/1983), hlm 13

<sup>49</sup> Ibid, hlm 39 dan 41

terpelihara dengan baik. Suasana demikian akan mendukung penciptaan stabilitas nasional yang sangat diperlukan dalam pembangunan di segala bidang, termasuk bidang agama.

Jika dilihat dari perspektif pemerintah, dapat dipahami bahwa mengapa pemerintah mencoba membuat suatu pengaturan terkait dengan Pembangunan Rumah Ibadah melalui PMB pendirian Rumah Ibadah tahun 2006, yaitu untuk menjaga ketertiban umum, mengingat Negara Indonesia adalah negara yang plural yang memiliki berbagai agama dan kepercayaan. Pada dasarnya ketentuan PMB ini adalah prosedur administratif, yang berarti sepanjang aturan dipenuhi seyogyanya tidak akan menimbulkan konflik. Pengaturan tentang izin pembangunan Rumah Ibadah ini dalam konteks HAM pada dasarnya diperkenankan sepanjang untuk mencegah kekacauan publik.<sup>50</sup>

Aturan rumah ibadah menurut SKB 2 Menteri No. 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepada Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah sebagai berikut :

---

<sup>50</sup>Nela Sumika Putri, Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (Eksternal Freedom) Dihubungkan Izin Pembangunan Rumah Ibadah, Jurnal, (Sumedang: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2012), hlm 13.

## BAB IV

### PENDIRIAN RUMAH IBADAT

#### Pasal 13

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

#### Pasal 14

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
  - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);

- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60(enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
  - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
  - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

#### Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

#### Pasal 16

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
- (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



## Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.<sup>51</sup>

Persyaratan Administratif sebagai berikut :

- a. Surat keterangan dari lurah setempat yaitu menyebutkan tentang keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah pemeluk agama yang bersangkutan di wilayah kelurahan dan kebenaran lokasi tanah dan status kepemilikan tidak dalam sengketa;
- b. Bukti kepemilikan lahan dengan melampirkan surat keterangan tentang status tanah dari Kantor Badan Pertahanan Nasional setempat atau Akte Ikrar wakaf dari Kantor Urusan Agama setempat atau persetujuan pemanfaatan tanah dari instansi pemerintah apabila tanah milik pemerintah atau non pemerintah atau lembaga lainya;
- c. Ketetapan rencana kota dan rencana tata letak bangunan;
- d. Rencana gambar bangunan;
- e. Daftar susunan pengurus atau panitia pembangunan rumah ibadat yang diketahui lurah setempat; dan
- f. Rencana anggaran biaya yang dibutuhkan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepada Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah*

<sup>52</sup>Pasal 3 Peraturan Gubernur 83 tahun 2012

Sedangkan persyaratan teknis bangunan gedung adalah memenuhi ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung dan peruntukan tanah rumah ibadah.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup>Pasal 4 *Peraturan Gubernur* 83 tahun 2012

## BAB VI

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 21

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran dari FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan setempat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

#### Pasal 22

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.<sup>54</sup>

### **D. Kebebasan Beragama dan Menjalankan Agama Menurut Hukum**

#### **Islam, Pancasila dan UUD 45**

---

<sup>54</sup> Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepada Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah*

Secara Hukum Islam mengenai kebebasan beragama itu sendiri sudah diatur sejak zaman Rasulullah saw di dalam Piagam Madinah nya yaitu pasal 25 Piagam Madinah. Mengenai kebebasan beragama ini juga mengacu pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah: 256 yang maksud dari isi surat tersebut ialah mengenai tidak adanya paksaan dalam memilih agama dan dalam menjalankan ibadah agamanya.

Kebebasan beragama menurut Pancasila dan UUD 45, Sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, mengisyaratkan Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain, karena agama dan kepercayaan adalah hal yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai Khaliknya.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 dan 29 dimana Negara kita menjamin kebebasan beragama, dinyatakan pasal 28: setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Sedangkan

dalam pasal 29 UUD 45 Bab XI, Agama dinyatakan: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini merupakan jaminan negara atas kebebasan beragama di NKRI setiap penduduk berhak dan bebas memeluk serta beribadah, dan beramal sesuai dengan agama, keyakinan dan kepercayaannya.



### **BAB III**

## **PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI WAY KANDIS KECAMATAN TANJUNG SENANG**

### **A. Gambaran Umum di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang**

#### **1. Sejarah Kelurahan Way Kandis**

Pada awal tahun 1940 berdirilah sebuah Kampung yaitu Kampung Kedaton yang dipimpin oleh Kepala Kampung yang bernama ‘Pangeran Raja Dunia’. Sedangkan Way Kandis saat itu masih merupakan Lahan Perkebunan Masyarakat, berupa kebun kelapa, lada, padi maupun tanaman palawija lainnya.

Pada saat itu Way Kandis menggabungkan diri dengan Wilayah Tanjung Senang yang merupakan salah satu bagian dari Kampung Kedaton, Di mana Wilayah Tanjung Senang ketika itu telah menjadi Wilayah Pemukiman para Warga /Penduduk. Walaupun dalam jumlah yang relative sedikit dan disebut Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Suku bernama ‘Bapak Kasim’.

Pada Tahun 1960 penduduk maupun pemukimannya kian bertambah sehingga Way Kandis dipisah kembali dari Tanjung Senang dan menjadi Dusun tersendiri yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang bernama ‘Bapak Karno’ dan masih merupakan bagian Wilayah Kedaton dan kepemimpinannya beralih kepada ‘Bapak Gunawan’.

Pada Tahun 1981 Kedaton menjadi salah satu Wilayah Kelurahan yang masuk dalam daerah Kotamadya dati II Bandar Lampung, sedangkan



Way Kandis telah berubah menjadi salah satu lingkungan dalam Wilayah Kelurahan Kedaton dan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan yang bernama ‘Bapak A. Halik’.

Mengingat potensi yang dimiliki lingkungan Way Kandis serta keadaan jumlah penduduknya yang kian hari kian bertambah dan memenuhi persyaratan lainnya untuk menjadi Wilayah Kelurahan, maka pada tanggal 10 Agustus 1988 Lingkungan Way Kandis ini secara resmi menjadi Kelurahan Way Kandis yang merupakan pemecahan dari Kelurahan Kedaton, dimana Kelurahan Way Kandis waktu itu dipimpin oleh seorang Lurah yang pertama yaitu ‘Bapak A. Halik’, sehingga secara legal terpisah dari Kelurahan Kedaton.

Dari awal berdirinya Kelurahan Way Kandis sampai sekarang telah terjadi beberapa kali pergantian pimpinan antara lain sebagai berikut :

- 
- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Bapak A. Halik            | Tahun 1988-1993            |
| 2. Ibu Santy Eviana          | Tahun 1994-1995            |
| 3. Bapak Rumoso              | Tahun 1996-1999            |
| 4. Bapak Alfiansyah Nur      | Tahun 2000-2003            |
| 5. Bapak Drs. Firdaus Firman | Tahun 2004-2006            |
| 6. Bapak Drs. Hasan Basri    | Tahun 2006-2009            |
| 7. Bapak Hi. Supangat        | Tahun 2009-2010            |
| 8. Bapak Supriyadi, SE       | Tahun 2010-2011            |
| 9. Bapak Rohimullah, SE      | Tahun 2011 sampai sekarang |

Adapun Prestasi yang pernah diraih antara lain :

1. Juara Kelompok Pencapir Tingkat Nasional Tahun 1997
2. Juara II Lomba BKB Kategori Dasar 1997
3. Juara III Penghijauan Tingkat Kota Tahun 1999
4. Juara III Pencapaian Target PBB Tahun 2001
5. Juara Kesrak Tingkat Nasional tahun 2006
6. Penghargaan Keluarga sadar hukum Tahun 2010
7. Juara III Lomba Kelurahan berprestasi, BBGRM dan 10 Program Pokok  
PKK Tahun 2012
2. Keadaan Geografis Kelurahan Way Kandis

a. Letak Wilayah

Kelurahan Way Kandis terletak pada bagian sebelah utara dari Kecamatan Kedaton, dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan  $\pm$  4 km dan jarak Ibu Kota Bandar Lampung  $\pm$  12 km serta jarak dari Ibu Kota Provinsi Lampung  $\pm$  16 Km.

b. Batas-Batas Wilayah

Kelurahan Way Kandis berbatasan dengan :

- a) Sebelah Utara : Desa Jatimulyo Lampung Selatan
- b) Sebelah Timur: Way Huwi Lampung Selatan
- c) Sebelah Barat : Desa Fajar Baru Lampung Selatan
- d) Sebelah Selatan: Kelurahan Pematang Wangi

c. Luas Kelurahan

Luas Wilayah Kelurahan Way Kandis saat ini  $\pm$  161 Ha, yang terdiri dari 2 (dua) Lingkungan dan 20 Rukun Tetangga (RT), Kelurahan Way Kandis berada  $\pm$  60 m di atas Permukaan Laut, dengan keadaan Topografinya yang tidak berbukit serta faktor kesuburan tanahnya yang cukup baik, sebagian besar keadaan tanahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian selebihnya adalah tanah tegalan dan lahan pekarangan penduduk.

d. Keadaan Alam

Kelurahan Way Kandis merupakan salah satu Wilayah yang ada di Kecamatan Tanjung Senang yang keberadaannya agak jauh dari hiruk pikuknya suasana perkotaan, sehingga keadaan alamnya masih utuh dan belum tercemari oleh industri-industri besar. Keadaan alamnya tidak berbukit dengan ketinggian dari permukaan air laut 60 m serta curah hujan antara bulan Oktober sampai April setiap tahun.

e. Tingkat Produktifitas Tanah

Tingkat kesuburan tanah di Kelurahan Way Kandis tergolong baik dengan jenis tanahnya podsolic coklat kemerah-merahan, dan letaknya sangat menguntungkan karena berada pada areal tanah datar, sehingga udarannya cukup sejuk dengan tingkat kesuburan yang cocok untuk tanaman pertanian yang kesemuanya dapat terlihat pada data terlampir.

3. Keadaan Demografi Kelurahan Way Kandis

Salah satu potensi yang perlu untuk diketahui dalam perencanaan, persiapan serta penetapan skala prioritas pembangunan, baik yang bersifat

fisik maupun non fisik, maka sektor kependudukan perlu diperhatikan sebelumnya agar semua kebijaksanaan dan program/proyek dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan yang akan kita capai.

Pada umumnya Warga Masyarakat Kelurahan Way kandis adalah Petani, Buruh Tani, dan Pedagang, Oleh karena itu sebagian besar lahan pekarangan masyarakat dimanfaatkan untuk bercocok tanam sebagai usaha sampingan bagi penduduk.<sup>55</sup>

Komposisi Penduduk di Kelurahan Way Kandis adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah Penduduk Seluruhnya: 8.818
- b) Jumlah Penduduk Pria : 4.382
- c) Jumlah Penduduk Wanita : 4.436
- d) Jumlah Kepala Keluarga : 2.275
- a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Masyarakat yang ada di way Kandis sama dengan masyarakat yang ada dikelurahan-kelurahan lainnya yang tidak terlepas dari ajaran Agama. Untuk jelasnya akan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1 Agama Yang ada di Way Kandis

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	3527 orang	3965 orang
Kristen	149 orang	163 orang
Katholik	273 orang	285 orang
Hindu	23 orang	16 orang
Budha	10 orang	7 orang
Khonghucu	..... orang	..... orang

<sup>55</sup>Buku Profil Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Provinsi Bandar Lampung tahun

Kepercayaan kepada Tuhan YME	..... orang	..... orang
Aliran kepercayaan lainnya	..... orang	..... orang
Jumlah	4382 orang	4436 orang

*Sumber: Data Umum Kelurahan Way Kandis Kec. Tanjung Senang*

b. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat mendasar bagi perkembangan kehidupan manusia untuk kearah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Berdasarkan jumlah dan tingkat pendidikan yang ada di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang, baik yang belum sekolah, tamatan Sekolah Dasar, tamatan Sekolah Menengah Pertama hingga ke Perguruan Tinggi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	296 orang	273 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/playgroup	118 orang	133 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	..... orang	..... orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	531 orang	589 orang
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	7 orang	5 orang
Usia 18-56 pernah SD tetapi tidak tamat	174 orang	104 orang
Tamat SD/ sederajat	928 orang	891 orang
Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	30 orang	27 orang
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	186 orang	155 orang
Tamat SMP/ sederajat	1279 orang	1305 orang
Tamat SMA/ sederajat	1337 orang	1342 orang
Tamat D-1/ sederajat	29 orang	90 orang
Tamat D-2/ sederajat	..... orang	..... orang
Tamat D-3/ sederajat	133 orang	211 orang
Tamat S-1/ sederajat	279 orang	246 orang

Tamat S-2/ sederajat	..... orang	..... orang
Tamat S-3/ sederajat	..... orang	..... orang
Tamat SLB A	..... orang	..... orang
Tamat SLB B	..... orang	..... orang
Tamat SLB C	..... orang	..... orang
JUMLAH TOTAL	4382 orang	4436ng

*Sumber: Data Umum Kelurahan Way Kandis Kec. Tanjung Senang*

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Apabila dilihat keadaan Way Kandis dapat disimpulkan masyarakat Way Kandis tersebut memiliki berbagai macam pekerjaan. Mulai dari yang sebagai petani, buruh, pedagang, pegawai negeri sipil dan lain-lain.<sup>56</sup> Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3 Berdasarkan Pekerjaan

Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	46 orang	46 orang
Pegawai negeri sipil	157 orang	139 orang
Pengrajin industri rumah tangga	2 orang	.... orang
Pedagang keliling	10 orang	.... orang
Peternak	2 orang	.... orang
TNI	9 orang	.... orang
POLRI	25 orang	.... orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	17 orang	4 orang
Pengacara	1 orang	.... orang
Karyawan perusahaan swasta	5 orang	.... orang
Karyawan perusahaan pemerintah	7 orang	.... orang
Sopir	10 orang	.... orang
Pramuwisata	119 orang	85 orang
Tukang kayu	97 orang	.... orang
Tukang batu	80 orang	.... orang
Wiraswata	195 orang	186 orang
Lain-lain	3616 orang	3970 orang

<sup>56</sup> Ibid



Jumlah total penduduk	4382 orang	4436 orang
-----------------------	------------	------------

*Sumber: Data Umum Kelurahan Way Kandis Kec. Tanjung Senang*

**Tabel 4 Prasarana Peribadatan**

Jumlah masjid	11 buah
Jumlah langgar/surau/mushola	05 buah
Jumlah gereja kristen protestan	0 buah
Jumlah gereja katolik	01 buah
Jumlah wihara	0 buah
Jumlah pura	0 buah
Jumlah klenteng	0 buah
Jumlah Rumah Ibadah	17 buah

*Sumber: Data Umum Kelurahan Way Kandis Kec. Tanjung Senang*

## **B. Pendirian Rumah Ibadah Gereja di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang.**

Kronologis Proses Perjalanan Pembangunan Rumah Ibadah Gedung Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung. Gedung Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Way Kandis mulai dibangun tahun 1967. Proses penggalangan dana dan pengurusan ijin pembangunan gedung Gereja diupayakan pada kepanitian sebelumnya. Pada hari Senin tanggal 16 November 2009 terbentuk kembali panitia pembangunan Gereja Katolik Stasi Way Kandis, Paroki Kedaton, Bandar Lampung.

Pada tanggal 17 Maret 2010 memproses balik nama sertifikat Hak Milik No: 1682/W.K., seluas 2.466 M<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur No: 501/W.K/2001 tanggal: 20-1-2001 menjadi atas nama: Gereja Katolik Paroki Kedaton, Tanjung Karang. Pada tanggal 29 juni 2010 memproses balik nama Sertifikat Hak Milik No: 1206/W.K Seluas 1.420 M<sup>2</sup> sesuai

Surat Ukur No: 688/W.K/1999 tanggal: 6-12-1999 menjadi atas nama Gereja Katolik Paroki Kedaton, Tanjung Karang.

Pada bulan september dan oktober 2010 panitia mencari dukungan dari warga sekitar gereja berupa tanda tangan dukungan dari warga sekitar Gereja (Non-Katolik) dan mendapatkan persetujuan dari 161 orang warga (dari syarat minimal 60 orang – sesuai PMB Pasal 14 ayat 2 Point b) serta diketahui Ketua-ketua RT, Ketua Lingkungan dan Lurah Way Kandis. Dari total jumlah penggunaan 818 orang diwakili oleh 181 orang (dari syarat minimal 90 orang – sesuai PMB Pasal 14 ayat 2 poin a) dengan dilampiri photo copy KTP. Pada hari selasa tanggal 19 oktober 2010 bertempat di kantor Walikota Bandar Lampung Panitia audiensi dengan Walikota Bandar Lampung. Dalam pertemuan ini diperoleh satu masukan bahwa Walikota mendukung atas proses pembangunan gedung Gereja Katolik Way Kandis asalkan Walikota melalui prosedur yang berlaku dan panitia sudah memenuhi peraturan yang berlaku.<sup>57</sup>

Pada tanggal 19 november 2010 mengajukan rekomendasi ke Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. Paa tanggal 9 desember 2010 bertempat di Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Way Kandis dilakukan verivikasi oleh Tim dari FKUB, Kemenag dan Kesbangpol Kota Bandar Lampung kepada umat pengguna dan masyarakat pendukung.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak, Khrisantus Sebagai Ketu Panitia Pendirian Gereja Santa Maria Immaculata di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang

Pada tanggal 10 desember 2010 mendapatkan Rekomendasi dari FKUB Kota Bandar Lampung dengan Nomor: 10/FKUB-BDL/XII/2010. Pada tanggal 13 desember mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dengan Nomor: Kd.08.0/1.c/Hm.03/755/2010. Pada tanggal 21 desember 2010 mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Kesbangpol Kota Bandar Lampung (tidak dipersyaratkan oleh PMB tetapi dianjurkan oleh Kesbangpol).

Pada tanggal 5 januari 2011 mendapatkan rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung dengan Nomor: 503/007a/19/2011 (tidak dipersyaratkan oleh PMB). Pada tanggal 13 januari 2011 mengajukan surat permohonan IMB kepada Kantor BPMP (Badan Penanaman Modal dan Perijinan) Kota Bandar Lampung. Pada tanggal 3 November 2011 Panitia menerima Surat ijin Pendahuluan Membangun (IPM) tertanggal 1 november 2011 BPMP Kota Bandar Lampung. Pada tanggal 22 november 2011 terbit rekomendasi No: 660/479.a/IV.32/2011 dari DinasPekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.<sup>58</sup>

Pada tanggal 12 desember 2011 panitia menghadap Walikota secara lisan Bapak Walikota menginstruksikan untuk membangun seluas 480 M<sup>2</sup> dulu tapi IPM jangan dirubah. Bapak Walikota siap mengawal proses pembangunan sampai selesai dan pembangunan diperbolehkan

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak, Martinus Tariantio Sebagai Ketua Gereja Santa Maria Immaculata di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang

setelah tahun baru. Pada tanggal 3 januari 2012 dilakukan misa pemberkatan batu dilanjutkan peletakan batu pertama.

Pada tanggal 6 januari 2012 panitia hearing dengan DPRD Kota Bandar Lampung Komisi D. Dalam Hearing Panitia menanyakan kepada Anggota Dewan apakah dari Peraturan Bersama Menteri (PBM) tahun 2006 No. 8 dan 9 ada yang belum dipenuhi oleh pihak panitia dan dijawab semua sudah dipenuhi oleh panitia. Oleh karena itu sebagai penutup dari hearing panitia mohon doa restu dari Anggota Dewan Komisi D dan Pejabat Kota yang hadir untuk memulai membangun sesuai dengan instruktur dari Walikota dan IPM yang ada.

Dari mulai peletakan batu pertama sampai tanggal 12 januari 2012, proses pembangunan berjalan aman dan Kapolres berjanji akan mengamankan proses pembangunan itu karena sudah memenuhi semua aturan yang dipersyaratkan oleh PMB. Pada tanggal 13 januari 2012 menerima Surat Sekda Kota Bandar Lampung No: 450/26/1.09/2012 tentang: Peninjauan IPM Pembangunan Gereja yang Intinya Mengijikan Pembangunan Gereja.

Pada tanggal 20 januari 2012 Panitia mengirimkan surat kepada Walikota Bandar Lampung No: 30/PPG-K/WK/I/2012 yang intinya setuju dan menerima pembangunan Gedung Gereja. Pada tanggal 1 february terbit Surat Ijin Pendahuluan (IPM) No: 645/00154/30.11/III.27.8/II.2012. pembangunan dilanjutkan dengan diawali penggalian pondasi cakar ayam,

dilanjutkan dengan pengecoran tiang secara gotong royong oleh umat, juga beberapa tukang membuat pagar keliling tanah Gereja.

Pada tanggal 24 april 2012 dilaksanakan misa pemberkatan alat dan bahan untuk persiapan naik kap. Pada tanggal 25 april 2012 pelaksanaan naik kap dengan selamatan tumpeng menurut tradisi orang jawa. Pekerjaan fisik bangunan terus dilanjutkan dan dalam keadaan kondusif sampai dengan mengajukan permohonan penerbitan IMB tanggal 13 Agustus 2012 karena bobot sudah mencapai 86,33%.

Pada tanggal 28 agustus 2012 seorang petugas dari BPMP melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan penerbitan IMB. Pada tanggal 11 september 2012 pukul 14.00 bertempat di Kantor BPMP Kota Bandar Lampung Jl. Way Pengubuan diserahkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No: 645/01676/30.11/III.27.9/IX/2012 tertanggal 11 september 2012 oleh Bapak Beni (Sekertaris BPMP) yang merupakan hari bersejarah bagi umat Gereja Katolik Way Kandis.<sup>59</sup>

Selama proses pendirian Gereja Katolik Santa Maria Immaculata di Way Kandis terdapat penolakan dari warga Way Kandis yang mengatas namakan masyarakat untuk melakukan pendirian Gereja. Masyarakat yang menolak pendirian gereja tersebut beranggapan bahwa Gereja yang akan didirikan terlalu luas.<sup>60</sup> Masyarakat melihat bahwa yang beribadah di Gereja tersebut khususnya untuk warga Way Kandis hanya beberapa saja

---

<sup>59</sup>Ibid

<sup>60</sup>Wawancara dengan Bpk. Ardian sebagai anggota masyarakat yang ada di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang

justru banyak warga pendatang dari luar Way Kandis tersebut yang beribadah di Gereja tersebut.

Masyarakat di sekitar Way Kandis beranggapan bahwa warga-warga pendatang tersebut yang beribadah di Gereja Katolik Santa Maria Immaculata akan mengganggu kenyamanan dan keamanan warga sekitar Way Kandis.<sup>61</sup> Terjadinya penolakan atas pendirian Gereja oleh masyarakat di Way Kandis tersebut pada saat itu kondisinya cukup genting, karna masyarakat memasang beberapa spanduk-spanduk di beberapa titik seperti di depan bangunan yang akan didirikan Gereja, di depan kantor Walikota, yang berisikan bahwa mereka menolak adanya pendirian gereja tersebut. Dan masyarakat juga menganggap bahwa syarat dari SKB 2 Menteri mengenai Pendirian Tempat Ibadah yaitu salah satunya dengan memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar Gereja yaitu minimal 60 orang yang mempersetujui adanya bangunan Gereja tersebut datanya ialah palsu. Hingga ketua panitia Pendirian Gereja melakukan pengumpulan data ulang dari warga sekitar gereja di Way Kandis.<sup>62</sup>

Karna kejadian ini pula pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dikumpulkan warga yang mempersetujui adanya pendirian Gereja, warga yang menolak adanya pendirian Gereja, ketua panitia pendirian Gereja, serta warga katolik di Way Kandis yang

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Alfa Ridho sebagai anggota masyarakat yang ada di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang

<sup>62</sup>Wawancara dengan Bpk. Rohimullah sebagai Lurah di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang



akan menggunakan tempat ibadah tersebut, dan dihadiri pula oleh Walikota serta ketua Forum Kerukunan Umat Beragama pada saat itu.

Akhirnya ditemukan jalan tengah yaitu masyarakat yang menganggap pendirian Gereja yang sangat luas yang awalnya luas Gereja 480 m<sup>2</sup> didalam IMB (Izin Mendirikan Bangunan) hanya diperbolehkan 300 m<sup>2</sup>. Dan gereja tersebut tidak boleh didirikan ulang hanya boleh dilakukan renovasi saja.<sup>63</sup>



---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Bapak, Khrisantus Sebagai Ketu Panitia Pendirian Gereja Santa Maria Immaculata di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang

## BAB IV

### PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN SKB 2 MENTERI NOMOR 8 DAN 9 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN GEREJA DI WAY KANDIS TANJUNG SENANG

#### A. Pandangan Hukum Islam tentang Pendirian Gereja di Way Kandis Tanjung Senang

Secara Hukum Islam pendirian Gereja Katolik Santa Maria Immaculata yang terjadi di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang diperbolehkan karena tidak adanya larangan atau paksaan dalam Islam untuk suatu kaum menganut agama tertentu sehingga Islam memperbolehkan untuk setiap umat yang memiliki keyakinan untuk dapat beribadah di tempat ibadahnya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Hal ini berlandaskan pada piagam madinah mengenai kebebasan beragama dan toleransi serta surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ  
بِاللهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam).  
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah.  
Karena itu barang siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada*

*Allah maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Dalam Islam juga tidak ada tata cara khusus mengenai bagaimana tata cara pendirian suatu tempat ibadah. Hanya saja para ulama berpendapat untuk tidak adanya larangan terhadap bangunan peribadatan non-muslim di wilayah mayoritas muslim, apabila sebelumnya telah terjadi perjanjian dan kesepakatan mengenai hal tersebut.

#### **B. Pandangan SKB 2 Menteri No. 8 & 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Gerja Di Way Kandis Tanjung Senang**

Tata cara Pendirian Gereja Katolik Santa Maria Immaculata di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang yang sudah memenuhi syarat dan sudah mengikuti pada aturan-aturan dalam Surat Keputusan Bersama Dua Menteri Nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Dimana mekanisme pendirian tempat ibadah terdapat dalam beberapa pasal didalam SKB 2 Menteri Nomor 8 dan 9 tahun 2006 yaitu pasal 13 point (1) yang berisi tentang pendirian tempat didasarkan keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Pasal 14 point (1) di mana pendirian tempat ibadah harus memenuhi syarat administratif, pasal 14 point (2) dukungan masyarakat

setempat minimal 60 orang, daftar nama KTP penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang serta rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa proses Pendirian Gereja di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang telah sesuai dengan aturan tersebut. Dan saat terdapat perselisihan akibat pendirian tempat ibadat khususnya Gerja Santa Maria Immaculata di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang telah dilakukan dan diselesaikan secara musyawarah sesuai dengan SKB 2 Menteri No. 8 dan 9 tahun 2006 pasal 21.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat beberapa kesimpulan dari penelitian Pendirian Tempat Ibadah Gereja dalam Padangan Hukum Islam dan SKB 2 Menteri No. 8 & 9 tahun 2006 sebagai berikut :

1. Secara hukum Islam pendirian Gereja Santa Maria Immaculata di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang itu diperbolehkan karena tidak adanya larangan atau paksaan untuk suatu kaum menganut agama tertentu sehingga setiap umat yang beragama dapat beribadah di tempat ibadahnya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Dan tidak ada aturan khusus mengenai tata cara pendirian tempat Ibadah, hanya saja para ulama berpendapat Islam sendiri tidak melarang adanya pembangunan peribadatan non-muslim di wilayah muslim. Apabila sebelumnya telah terjadi perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan mengenai hal tersebut. Dan pada masa nabi Muhammad SAW telah diaturnya mengenai kebebasan beragama dan toleransi dalam rangka menciptakan kerukunan sesama umat beragama.
2. Proses Pendirian tempat Ibadah Gereja di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang telah sesuai dengan aturan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri No. 8 & 9 tahun 2006. Hanya saja beberapa masyarakat

di daerah Way Kandis yang masih kurang memahami makna toleransi terhadap sesama umat beragama. Pemberian kebebasan kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinan dan beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Karna dengan adanya sikap bertoleransi maka akan dapat melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa, mendukung dan menyukseskan pembangunan, serta menghilangkan kesenjangan.

## **B. Saran**

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dalam kesempatan ini penulis akan memberikan saran, khususnya kepada masyarakat di daerah Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang dapat lebih bersikap toleransi dan bersikap adil. Agar sesama umat beragama dapat beribadah sesuai keyakinan dan ajaran agamanya masing-masing dengan aman dan nyaman. Baik muslim dan non-muslim tetap dapat hidup rukun, berdampingan, saling membantu dan menghormati kebebasan beragama di lingkungan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Al-Ainiyy Ahmad, '*Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari* (Mishr: Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1972) cet. Pertama, juz 18
- Al-Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Penerbit Kalim
- Al-Wahadi, *Asbab Nuzul Al-Quran* (t.tp. : Dar al-Qiblah li al-Saqafah al-Islamiyyah. 1984) cet. Ke-2
- Anwar Ahmad, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975)
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Asti Kleinsteuber, *Klenteng-Klenteng Kuna Indonesia* , 2010, p.10
- Hamim HR, *Rumah Ibadah Non-muslim dalam Pandangan Fikih Klasik*, Artikel, 15 juni 2017
- Hasan Alwi, , dkk. 2007, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka).
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta : Tintamas, 1973)
- J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Besar bahasa Indonesia*
- Jurnal *Kedudukan dan Fungsi Surat Keputusan Bersama Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*, Nurhadi Saputra 2011
- Khallaf Abd al-Wahhab di dalam bukunya *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Al-Qahirah: Dar al-Anshar, 1977)
- Khallaf, Abdul Wahab *kaidah-kaidah hukum islam* (jakarta: PT. Raja grafindo persada, 1994, cetakan ke empat)
- Lexy J.Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke 22, (Bandung: Raja Resdakarya, 2004)
- Lois Gootschalk, *Understanding, History, A Primer Of Historical Method*, Terjemah Nugroho Noto Susanto, UI Press, 1985

Masdar Farid Mas'udi, *Membangun NU Berbasis Masjid dan Umat* (Jakarta: Lajnah Takmir Masjid Nahdatul Ulama –LTMNU,2007)

Munir Abdul, *Pokok-pokok Ajaran NU*, Ramdhani, Solo, 1989

Nasri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota Ikapi, 2006)

Nasution Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985) cet, ke-5, jilid 1.

Pasal 3 dan 4 *Peraturan Gubernur* 83 tahun 2012

Peraturan Departemen Agama RI Nomor H III/BA,01.1/03/1/1992, Bab.II,2

PT Gramedia Pustaka Utama,*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta, 2008) cet.4

Saleh H.E Hassan (ed), *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008)

Sedamayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung; Mandar Maju, 2002)

Shihab Quraish, "*Membumikan Al-Quran*" (Bandung: Mizan, 1992) cet. I

SKB 2 Menteri No. 8 dan 9 tahun 2006 *tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepada Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah*

Subagyo Joko, *Metodelogi penelitian dalam teori dan praktek* (Jakarta: PT, Rineke cipta 2004)

Susiadi AS,M.Sos.I, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Intitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)

Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979)

*UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*

W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought* (Edinburg: Edinburg Universitu Press, 1980)

Yusuf, Ahmad Muhammad, *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Quran dan hadits*,  
Jakarta: Widya Cahaya, Jilid 5

